

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA PERAHU PINISI DI KELURAHAN TANAH BERU
KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

ANDI MEUTHIA A.M

Nomor Stambuk: 10561 05171 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA PERAHU PINISI DI KELURAHAN TANAH BERU
KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI MEUTHIA A.M

Nomor Stambuk: 10561 05171 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Phinisi Di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Andi Meuthia A.M

Stambuk : 10561 05171 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

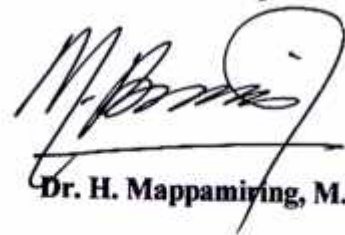
Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Alyas, M.S

Pembimbing II



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0005/FSP/A.1-VIII/I/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

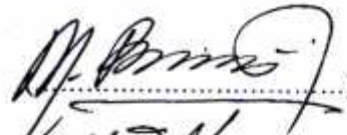
Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

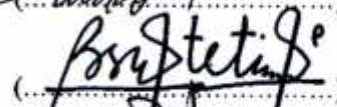
1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (ketua)


.....)

2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd


.....)

3. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si


.....)

4. Dr. Muhammad Tahir, M.Si


.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Meuthia A.M

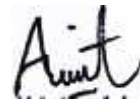
Nomor Stambuk : 10561 05171 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 15 September 2018

Yang Menyatakan



ANDI MEUTHIA. A.M

ABSTRAK

ANDI MEUTHIA A.M. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Alyas dan Mappamiring).

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, memfokuskan permasalahan pada peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator dalam setiap pelaksanaan program-program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator dan katalisator .

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah 9 orang dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sementara analisa data secara kualitatif dilakukan secara sistematis yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator dan katalisator sudah dapat direalisasikan dengan cukup baik. Hanya saja perlu lebih mengintensifkan metode pendekatan persuasif dalam setiap peran yang dilakukan agar terbangun hubungan yang harmonis dan seimbang antara pelaksanaan program yang dijalankan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Kelurahan Tanah Beru agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan tepat sasaran dengan maksud untuk mendorong kesejahteraan sosial masyarakat baik ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.

Katakunci : Peran Pemerintah, dan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi

KATA PENGANTAR



“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelas sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ayahanda **Andi Mattalatta, S.E** dan Ibunda **Andi Rayhani Apdy, S.Pd** Atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT. Kepada kedua saudaraku dan ipar yang selalu memberikan semangat dalam segala bentuk tingkah laku yang tidak bisa tertebak untuk mengalihkan rasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini, **Andi Maryam Mattalatta, S.Kep, Andi Parawanda Mattalatta, S.Sos, dan Reza Munawir, S.Pd, M.Pd** Terima kasih atas semua bentuk penyemangatnya yang tidak bisa tertebak.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda Prof. Dr. Alyas, M.S selaku pembimbing I dan Ayahanda Dr. H. Mappamiring, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.

6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian..
7. Buat Kakak-kakak tercinta, Kakanda Akhsrullah, S.Sos, M.Ap, Kakanda Muh. Aswar Darwis, S.Sos, Kakanda Andi Sul Haris Hasan, S.Sos yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
8. Buat Saudariku The Power Squad yang telah menemani, menyemangati, serta selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada saya selama ini, Rahmiati, Ayu Kartika, Erika Yuliantika, Iva Nurul Arsita, dan Sitti Nur Rahmah, S.Sos.
9. Kepada Keluargaku di NUSANTARA INSTITUTE Kakak, adik-adikku dan saudara-saudaraku yang selama ini telah memberikan dorongan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Kakanda, adinda dan teman-teman pengurus HUMANIERA yang telah memberikan ruang untuk berproses di dalamnya.
11. Seluruh teman-teman kelas I yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.
12. Kepada seluruh keluarga besar SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar terutama kepada satu angkatan saya 2014 AFILIASI yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 September 2018



ANDI MEUTHIA. A.M

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Peran Pemerintah	9
1. Pengertian Pemerintah Daerah	9
2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah	11
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan	12
B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	16
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	16
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	22
3. Hambatan dan Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	23
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	26
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	26
2. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	28
D. Industri Kerajinan Perahu Pinisi	29
1. Selayang Pandang	29
2. Ritual Pembuatan Perahu Pinsi	30
3. Kelempok Pekerja Perahu Pinisi	31
D. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian	34
G. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Deskripsi Obyek Penelitian	42
	1. Keadaan Penduduk Kelurahan Tanah Beru	42
	2. Keadaan Pegawai Kantor Kelurahan Tanah Beru	46
	B. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba	48
BAB V	PENUTUP	82
	A. Simpulan	84
	B. Saran	
	DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Dafatar Pengusaha Prahu Pinisi	32
2	Informan Penelitian	35
2.1	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
2.2	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin	39
2.3	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
2.4	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
3.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan	42
3.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	43
3.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	89
Lampiran 2	Dokumentasi	93
Lampiran	Riwayat Hidup	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama baik pada tingkat pemerintah pusat terlebih lagi pada pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Bulukumba mampu mengangkat kehidupan ekonomi masyarakat di segala aspek dan sendi kehidupan sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulukumba terlebih masyarakat pesisir pantai harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam konteks pembangunan jangka panjang sekaligus sebagai bentuk upaya dalam memberdayakan sumber daya manusia seutuhnya.

Proses pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bukan saja bertumpu kepada pembangunan sarana dan prasarana daerah (pendidikan, kesehatan, jalan dan sumber daya alam), akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu yang menjadi poin penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah kesejahteraan masyarakat sehingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adalah tugas pokok dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba utamanya Pemerintah Kecamatan Bonto Bahari

untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang mayoritas berdiam atau bertempat tinggal di Tanah Beru. Kondisi masyarakat di kawasan tersebut berprofesi sebagai pekerja pembuat perahu Pinisi sebagai salah satu mata pencaharian utama. Hal ini disebabkan karena secara geografis wilayah Tanah Beru merupakan daerah pesisir pantai yang menjadi salah satu tempat pembuatan perahu Pinisi selain di kawasan Tanah Lemo.

Banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai pembuat perahu Pinisi, menyebabkan Tanah Beru sebagai salah satu pusat pembuatan perahu Pinisi yang sangat terkenal di kawasan selatan Sulawesi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kebanyakan para wisatawan sangat menginginkan perahu Pinisi hasil buatan dari masyarakat Tanah Beru. Disamping karena dianggap sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO (nilai-nilai filosofi dari perahu Pinisi), kualitas perahu Pinisi buatan masyarakat Tanah Beru telah lama diakui oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara karena kekuatan dan ketahanan perahunya. Dengan banyaknya peminat dari para wisatawan inilah sudah tentu kesejahteraan masyarakat di Tanah Beru akan meningkat terutama bagi para pekerja perahu Pinisi. Namun kenyataannya, tingkat kesejahteraan para pekerja tersebut masih terbilang jauh dari harapan, seperti yang terlihat bahwa kesejahteraan pekerja perahu pinisi tak seperti kejayaan nama perahu Pinisi seperti gaji yang diterima para pekrjanya habis sebelum perahu selesai, diakibatkan gaji mereka tersebut di jadikan modal awal untuk persiapan bahan baku pembuatan perahu, disini terlihat bahwa tidak adanya perhatian khusus ini tercermin dari kondisi para pekerja pinisi (*Viva news*), dari kutipan tersebut

terlihat bahwa kesejahteraan pekerja perahu pinisi masih belum maksimal Hal ini disebabkan dalam proses pembuatan perahu Pinisi membutuhkan waktu yang cukup lama (minimal satu tahun) agar menjadi perahu Pinisi yang sempurna dan dapat digunakan. Dalam proses pembuatan yang cukup lama ini, maka pengeluaran para pekerja (pengeluaran pribadi dan kebutuhan keluarga) juga semakin meningkat, sehingga memaksa para pekerja untuk mencari pekerjaan lain sebagai penunjang.

Tuntutan hidup para pekerja perahu Pinisi di Tanah Beru inilah yang harus menjadi salah satu fokus pemerintah baik pada tingkat pemerintah Kabupaten terlebih lagi pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebagai wujud tanggung jawab dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pekerja perahu Pinisi). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. dan pada ayat 4 menjelaskan “Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi, berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi baik pada tingkat pusat maupun daerah sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan yang lebih inovatif dan lebih

berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan terlebih lagi bagi masyarakat pesisir pantai di Tanah Beru Kecamatan Bonto Bahari kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosni (2017), dengan judul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”. Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, perubahan pola pikir masyarakat nelayan dan keterlibatan lembaga-lembaga penyuluhan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan secara berkelanjutan sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Batubara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Hasil penelitian ini berfokus kepada pemberian bantuan modal usaha ataupun bantuan dalam bidang pendidikan dan latihan keterampilan masyarakat nelayan serta keterlibatan aktif lembaga-lembaga penyuluhan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat nelayan agar mereka mampu untuk mencari pekerjaan tambahan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan (ekonomi) menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini para nelayan yang berada di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara hanya membahas tentang upaya dari pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten Batubara melalui lembaga-lembaga penyuluhan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan dan upaya dalam mengubah pola pikir masyarakat nelayan melalui pemberian keterampilan yang sesuai dengan profesinya. Namun pada konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak mencoba untuk membangun mental

para masyarakat nelayan untuk mampu mandiri dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab menurut penulis konsep pemberdayaan masyarakat bukan saja tentang upaya pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat baik bantuan langsung maupun pelatihan keterampilan, akan tetapi hal yang terpenting dari proses tersebut adalah bagaimana melahirkan masyarakat yang mandiri dan mampu keluar dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi dalam hal ini adalah masyarakat pekerja perahu Pinisi di Tanah Beru.

Lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2018), dengan judul “Analisis Pola Hubungan Kerja dan Sistem Bagi Hasil Pada Pembuatan Kapal Pinisi di Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini membahas tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Lemo dengan cara hubungan kerja dan sistem bagi hasil antara pengusaha kapal dengan pekerja. Hasil penelitian ini berfokus pada 2 (dua) hal yaitu: (a) proses hubungan kerja dan sistem bagi hasil dengan menggunakan sistem tradisional atau yang lebih di kenal dengan *punggawa-sawi*. Dimana *Punggawa* (Patron) merupakan orang yang selalu menyediakan bantuan sosial termasuk modal kepada *sawinya*, sedangkan *sawi* (klien) adalah orang yang bekerja pada *punggawa* tersebut; dan (b) peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui pembuatan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Lemo melalui pembatasan pengusaha Eropa untuk masuk ke Tanah Lemo karena dianggap akan mematikan pengusaha lokal (pengusaha pembuat perahu Pinisi).

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Lemo membutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membuat sebuah regulasi yang lebih berorientasi kepada masyarakat dan bukannya kepada para pengusaha-pengusaha tertentu yang malah akan mematikan pengusaha lokal dalam hal ini pengusaha pembuat perahu Pinisi. Dengan adanya kebijakan/regulasi mengenai pembatasan kepada para pengusaha mancanegara ini, bukan suatu hal yang mustahil pengusaha-pengusaha lokal akan berkembang yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terkait tingkat kesejahteraan masyarakat pekerja perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru menunjukkan bahwa sampai sejauh ini belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba terutama pemerintah Kelurahan Tanah Beru dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya warga yang berdomisili di wilayah pesisir pantai sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah setempat terkait dengan proses-proses pemberdayaan. Selain itu kondisi sarana perhubungan jalan sebagai faktor penting untuk memudahkan masyarakat pekerja perahu Pinisi dalam penyediaan keperluan pembuatan kapal rusak parah. Tidak adanya tempat pembinaan dan keterampilan (UKM) masyarakat yang tersedia sebagai wadah pemberdayaan, akibatnya pola pembinaan dan keterampilan yang mereka peroleh hanya mereka dapatkan dari

masyarakat sekitar yang lebih dulu mengetahui tentang teknik pembuatan perahu Pinisi atau secara otodidak.

Kondisi di atas, semakin diperparah dengan penggunaan teknologi pembuatan perahu Pinisi yang masih sangat tradisional sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah perahu Pinisi secara sempurna. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pekerja masih sangat terbatas diakibatkan oleh proses pemberian keterampilan hanya didapatkan dari masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai pekerja perahu Pinisi. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bulukumba harus segera mengambil langkah konkret dalam membantu masyarakat pekerja Pinisi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai *“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu administrasi Negara utamanya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat bermanfaat bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan agar kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba terkhusus bagi pemerintah Kelurahan Tanah Beru agar mampu memberikan bantuan baik secara finansial maupun material kepada masyarakat pekerja perahu Pinisi sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peran Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Nawawi (2013), pemerintah daerah adalah lembaga atau institusi-institusi publik yang mempunyai kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya dalam mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah merupakan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya membangun daerah secara otonom dalam rangka mencapai tujuan baik dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan secara berdaya guna sebagai bagian dari tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tuntut untuk mampu berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan sebagai bagian utama dari peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang kehidupan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien dan tanpa tindakan diskriminatif.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya harus mampu menciptakan pola hubungan timbal balik dan harmonis dengan pemerintah pusat bahkan termasuk dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini dapat berupa hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah (2005), yang menjelaskan bahwa hubungan-hubungan yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya akan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar sesama pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sementara itu, hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang bulat. Hal ini berarti betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan otonomi tersebut tetaplah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain uraian yang telah dijelaskan di atas, menurut Widjaja (2013), melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya

dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat. Otonomi yang bertanggungjawab yang dimaksud berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Tugas Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai tugas diantaranya:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah mempunyai wewenang diantaranya:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Perkada keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan

Peran pemerintah dalam perspektif otonomi daerah merujuk kepada kedudukan dan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku fasilitator dan pengayom bagi masyarakat suatu daerah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan

oleh Soekanto (2012: 212), bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dari sebuah kedudukan. Apabila seseorang atau kelompok telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status (kedudukan) yang dimiliki, maka sesungguhnya dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Thoah (2012: 10), peranan dapat diartikan sebagai rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Timbulnya peran karena seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mungkin untuk bekerja sendiri. Hal ini dikarenakan karena masing-masing individu atau kelompok memiliki lingkungan yang setiap saat di tuntut untuk senantiasa berinteraksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merujuk kepada fungsi dari sebuah institusi pemerintah selaku fasilitator dan juga sebagai pengayom (menciptakan stabilitas keamanan dan ekonomi) bagi masyarakat yang berada di bawah naungannya. Selain itu, peran pemerintah juga bergantung kepada lingkungan dimana pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun menurut Muluk (2005: 62-63), peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan. Bila dikaitkan dengan konteks peran pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba harus bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (kebutuhan dasar), harus mampu mengalokasikan dana sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat

berdasarkan pada kewenangan dan kedudukan yang dimilikinya. Sehingga pemerintah akan berperan sebagai distributor dan juga sebagai fasilitator bagi masyarakat.

Menurut Leach dan Stewart dalam Muluk (2005: 62-63), peran pemerintah daerah terbagi atas peran lemah dan peran yang kuat. Peran pemerintah daerah yang lemah di tandai dengan beberapa hal, yaitu:

- a. Rentang tanggung jawab, fungsi dan kewenangan yang sempit;
- b. Penyelenggaraan pemerintah yang reaktif; dan
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Adapun peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Adanya rentang tanggung jawab, fungsi dan kewenangan yang luas;
- b. Cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat positif; dan
- c. Derajat otonomi yang tinggi terhadap fungsi-fungsi yang diembannya dan terbatasnya derajat kontrol eksternal.

Lebih lanjut menurut Dwijowijoto dan Wrihatnolo (2006), peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional terbagi atas:

- a. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar

kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

d. Inovator

Pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut (temuan, metode, sistem, dan cara berpikir). Sebagai inovator pembangunan, maka harus memiliki kemampuan menterjemahkan program pembangunan daerah dengan bahasan yang sederhana serta menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan.

e. Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, peran pemerintah dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian halnya dalam konteks pemerintahan daerah yang otonom, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam segala bidang kehidupan. Salah satu yang menjadi ciri peran pemerintah yang kuat adalah dengan melihat seberapa besar fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Apakah pelaksanaan pembangunan tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan derajat otonom yang tinggi tanpa adanya intervensi dari kelompok kepentingan manapun.

B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menjadi sebuah masyarakat yang sejahtera baik dari segi sandang, pangan dan papan merupakan sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh siapa pun bahkan sudah menjadi tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Hal ini juga dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar alenea ke-IV yang menjadi tolok ukur sekaligus amanah dari konstitusi yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah mampu

memberikan penghidupan yang layak kepada setiap rakyatnya termasuk segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap pemerintahan baik pusat dan daerah dalam mencapai hal yang diinginkan tersebut.

Tiga kategori yang merupakan target pencapaian kesejahteraan yakni tentang. sejauh mana permasalahan sosial yang dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan dapat terpenuhi, dan sejauh mana kesempatan untuk memperoleh peningkatan taraf hidup, (Midgley, 2005). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, program pembangunan PBB (UNDP) melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota (Gregorius, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan wujud dari segala daya dan upaya untuk memenuhi segala aspek kehidupan oleh individu maupun kolektif profesional sehingga tercapai hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat berfungsi secara sosial, dimana masyarakat diberi perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan menurut Huda (2009), kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang dilakukan secara terorganisir yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan pada konteks sosialnya yang di dalamnya mencakup

beberapa unsur seperti unsur kebijakan dan pelayanan secara luas seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas terkait pengertian kesejahteraan, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup yang di dalamnya mencakup jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pendapatan. Kesemuanya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus merupakan amanat dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya masyarakat di tingkat bawah merupakan prioritas utama yang harus segera dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Lebih lanjut menurut Badrudin (2012), bahwa dalam kesejahteraan masyarakat tidak dapat terpisahkan dari sudut pandang pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan suatu pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Keberhasilan dari sebuah pembangunan ekonomi tanpa mengikutsertakan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan dalam hubungan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006), menguraikan bahwa tolok ukur kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dapat dilihat berdasarkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: (a) *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti; makanan,

perumahan, kesehatan dan perlindungan hidup; (b) *kedua*, meningkatnya taraf hidup, pendapatan, pendidikan dan atensi terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan; (c) *ketiga*, meluasnya skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak dapat terpisahkan dari sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil atau mencapai tujuannya apabila masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Masyarakat yang sejahtera dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sejauh mana masyarakatnya memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar (makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan keamanan hidup), tingkat kehidupan, pendapatan, serta kemanusiaan dapat dicapai oleh masyarakat dan yang terakhir adalah adanya berbagai pilihan sosial dari masing-masing individu dan bangsa.

a. Aspek kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi sebuah negara dan bersifat obyektif sehingga ukuran untuk sebuah kesejahteraan berbeda-beda antara individu ataupun keluarga. Akan tetapi pada prinsipnya kesejahteraan seseorang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan apabila seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka telah dianggap bahwa tingkat kesejahteraannya cukup baik. Sedangkan sebaliknya apabila seseorang atau keluarga belum mampu untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dianggap tingkat kesejahteraan yang dimilikinya rendah.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Natalia (2016), pendapatan per kapita, tingkat kesehatan dan pendidikan, serta ketersediaan sumber daya individu atau keluarga sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi yang dimilikinya. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan dengan pendapatan per kapita yang tinggi, sedangkan ekonomi masyarakat yang kurang makmur ditunjukkan dengan pendapatan per kapita yang rendah. Adapun aspek yang mempengaruhi kesejahteraan individu maupun masyarakat antara lain:

- 1) Pangan, merupakan makanan sehari-hari yang sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk setiap individu dan keluarga yang cerdas, sehat dan kuat. Oleh karena itu, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi dan menyediakan kebutuhan pangan yang bermutu.
- 2) Sandang, merupakan salah satu kebutuhan pokok dan kelengkapan hidup bagi setiap individu dan keluarga, maka diperlukan adanya pemenuhan sandang dalam jumlah yang cukup dan sehat.
- 3) Perumahan, merupakan tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tenteram, aman dan bahagia. Oleh sebab itu perlu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan teratur, dan lingkungan untuk meningkatkan rasa bahagia, tentram dan mutu hidup.
- 4) Pendidikan, untuk membentuk manusia seutuhnya berdasarkan pancasila, maka mutlak setiap individu dan keluarga mengecap pendidikan sebagai

dasar kesejahteraan. Minimal setiap individu dan keluarga menempuh pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan standar terendah dari sebuah keluarga sejahtera.

- 5) Kesehatan, kesehatan merupakan syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup, karena itu perlu dihayati bagaimana cara memelihara kesehatan itu baik pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan mandiri. (Natalia, 2016).

b. Penggolongan tingkat kesejahteraan masyarakat

Menurut BKKBN dalam Natalia (2016), penggolongan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*), secara minimal seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Dikatakan sebagai keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), karena belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: (a) Indikator ekonomi; makan dua kali atau lebih dalam sehari, memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (di rumah, di sekolah, di kantor atau bepergian), bagian terluas dari rumah bukan tanah, (b) Indikator non ekonomi; melaksanakan ibadah, sarana kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera 1

Keluarga sejahtera 1 (keluarga miskin), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat

memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

3) Keluarga Sejahtera 2

Merupakan keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi; tabungan keluarga, makan bersama sambil komunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (minimal 6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, menggunakan sarana transportasi.

4) Keluarga Sejahtera 3

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologi dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat. Seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

5) Keluarga Sejahtera 3 Plus

Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator, seperti; aktif memberikan sumbangan secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan anggota keluarga secara aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Adapun menurut Thomas dalam Sugiarto (2007), indikator kesejahteraan suatu daerah diukur melalui tingkat

kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, emisi gas CO₂, perusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto (PDB). Sedangkan menurut Todaro dalam Hidayat (2014), menjelaskan bahwa kesejahteraan suatu wilayah juga ditentukan dari ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (H), sumber daya fisik (K) dan sumber daya lain (R). Ketiga sumber daya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendapatan orang kaya (golongan menengah ke atas) akan digunakan untuk dibelanjakan pada barang mewah, emas, perhiasan, rumah yang mahal. Golongan menengah ke bawah yang memiliki karakteristik miskin, kesehatan, gizi dan pendidikan yang rendah, peningkatan pendapatan dapat meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

3. Hambatan dan Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Nurdin dalam Hidayat (2014), timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial disebabkan oleh 5 hambatan, yaitu:

a. Ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi merupakan hambatan utama yang menyebabkan adanya berbagai masalah. Hal ini dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu, kelompok dan masyarakat. Sebab dari Ketergantungan ekonomi sebagian besar disebabkan kurangnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi standar kehidupan minimal dalam kehidupannya, atau ketidakmampuan mengelola pendapatan mereka yang seharusnya dapat

mencukupi. Dari hambatan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial antara lain kemiskinan.

b. Ketidakmampuan menyesuaikan diri

Ketidakmampuan menyesuaikan diri ini timbul dari masalah kemiskinan dan emosional, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Hal ini merupakan jenis hambatan yang dikenal dengan istilah “hambatan sosial psikologis”. Masalah yang dapat timbul dari permasalahan ini antara lain: seseorang mengalami perubahan, baik sikap maupun perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan tertentu. Masalah-masalah penyesuaian diri dapat menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti kenakalan remaja, pelacuran dan lain sebagainya.

c. Kesehatan yang buruk

Kesehatan yang buruk dapat disebabkan beberapa faktor yaitu; lingkungan yang buruk atau kotor, adanya berbagai penyakit dan ketidaktahuan anggota masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut berkaitan pula dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Persoalan-persoalan yang bersumber dari berbagai faktor di atas dapat menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit menular, kekurangan gizi, yang akhirnya menuju kematian.

d. Rekreasi dan pengisian waktu senggang

Rekreasi dan pengisian waktu senggang merupakan kebutuhan yang fundamental bagi kehidupan seseorang serta memiliki fungsi-fungsi lain

untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan seseorang, pembebasan dari suasana rutin yang terus menerus, penyegaran dari beban pikiran dan tanggung jawab yang berat, atau perasaan jenuh selama bekerja di kantor. Perlunya memperhatikan rekreasi dan pengisian waktu luang yang positif setiap ada waktu luang yang digunakan dengan baik sifatnya cenderung digunakan secara negatif. Pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam masalah seperti kenakalan remaja, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pencurian dan perampokan.

- e. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik

Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik misalnya keadaan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga dapat dengan kuat mempengaruhi kepribadian individu. Demikian pula halnya dengan penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang atau tidak baik, akan mengakibatkan hasil pelayanan yang kurang memadai terhadap para pengguna pelayanan tersebut. Misalnya, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, kurangnya sarana pendidikan yang memadai dan sebagainya. Masalah-masalah dapat ditimbulkan oleh kondisi sosial, pelayanan yang kurang atau tidak baik dapat menjangkau penerima pelayanan.

Adapun tujuan dari kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharto (2008), bahwa tujuan dari pembangunan kesejahteraan

masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Pambudi (2003), pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan atas pemberdayaan ke dalam dan pemberdayaan ke luar. Pemberdayaan ke dalam adalah suatu daya dan upaya untuk mentransformasikan kesadaran masyarakat sekaligus bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan akses perbaikan kehidupannya. Sedangkan pemberdayaan ke luar adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan atas berbagai kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan sebagian besar masyarakat. Dalam arti bahwa sebagai pengendali yang berbasis pada pemberian ruang yang sebesar-besarnya kepada partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Sedangkan menurut Sulistiyani (2004), pemberdayaan dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan dan atau pemberian daya

dari pihak yang memiliki daya (pemerintah) kepada pihak yang kurang atau tidak memiliki daya (masyarakat).

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya yang terencana dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan (pemerintah pusat dan daerah) untuk ikut serta memberikan ruang kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam ikut serta menyukseskan berbagai program-program pembangunan secara partisipatif. Dengan pemberian ruang yang luas ini, diharapkan agar masyarakat mampu untuk mandiri dan berusaha dalam meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat kecil untuk dapat dievaluasi sehingga akan lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut menurut Sumodiningrat (2009), yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Sedangkan menurut Hikmat (2010), pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Nugroho (2008), mengemukakan beberapa indikator pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan;
- b. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut;
- c. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut; dan
- d. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Adapun indikator pemberdayaan menurut Sumodiningrat (2009), menjelaskan beberapa indikator pemberdayaan yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;

- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat; dan
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

D. Industri Kerajinan Perahu Pinisi

1. Selayang Pandang

Sejak dahulu suku Bugis di Sulawesi Selatan terkenal sebagai pelaut yang ulung. Mereka sangat piawai dalam mengarungi lautan dan samudera luas hingga ke berbagai kawasan di Nusantara dengan menggunakan perahu Pinisi.

Perahu pinisi merupakan alat transportasi laut tradisional masyarakat Bugis yang sudah terkenal sejak berabad-abad yang lalu. Menurut cerita di dalam naskah I Lagaligo, perahu pinisi sudah ada sekitar abad ke-14 M. Menurut naskah tersebut, perahu pinisi pertama kali dibuat oleh saweregading, Putra mahkota kerajaan Luwu. Bahan untuk membuat perahu tersebut diambil dari pohon welengreng (pohon dewata) yang terkenal sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Namun sebelum pohon itu ditebang terlebih dahulu dilaksanakan upacara khusus agar penunggunya bersedia pindah ke pohon lainnya. Saweregading membuat

perahu tersebut untuk berlayar menuju negeri Tiongkok yang hendak meminang putri Tiongkok yang bernama We Cudai.

Singkat cerita Saweregading berhasil memperistri putri tersebut, setelah beberapa lama tinggal di Tiongkok Sarewegading rindu kampung halamannya, dengan menggunakan perahu tersebut ia berlayar ke Luwu. Namun, ketika perahunya akan memasuki pantai Luwu tiba-tiba gelombang besar menghantam perahunya hingga pecah. Pecahan-pecahan perahu tersebut terdampar ke 3 (tiga) tempat di wilayah Kabupaten Bulukumba yaitu di desa Ara, Kelurahan Tanah Beru dan Tanah Lemo. Oleh masyarakat dari ketiga kelurahan tersebut, bagian-bagian perahu itu kemudian dirakit kembali menjadi sebuah perahu yang megah dan dinamakan Perahu Pinisi.

Hingga saat ini, Kabupaten Bulukumba masih dikenal sebagai produsen perahu pinisi, dimana para pengrajinnya tetap mempertahankan tradisi dalam pembuatan perahu tersebut, terutama di Kelurahan Tanah Beru Kabupaten Bulukumba.

2. Ritual Pembuatan Perahu Pinisi

Proses pembuatan perahu pinisi cukup unik, karena proses pembuatannya memadukan keterampilan teknis dengan kekuatan magis. Tahapan pertama dimulai dengan penentuan hari baik untuk mencari kayu (bahan kayu). Hari baik untuk mencari kayu biasanya jatuh pada hari ke-5 dan ke-7 pada bulan yang sedang berjalan. Angka 5 menyimbolkan naparilimai dalle'na, yang berarti rezki sudah ditangan, sedangkan angka 7 menyimbolkan natujuangngi dalle'na, yang berarti selalu mendapat rezki. Tahap selanjutnya adalah menebang,

mengeringkan dan memotong kayu. Kemudian kayu atau bahan baku tersebut dirakit menjadi sebuah perahu dengan memasang lunas, papan, mendempulnya, dan memasang tiang layar. Tahap terakhir adalah peluncuran perahu ke laut.

Tiap-tiap tahap tersebut selalu diadakan upacara-upacara adat tertentu. Sebelum perahu pinisi diluncurkan ke laut, terlebih dahulu dilaksanakan upacara *maccera lopi* (mensucikan perahu) yang ditandai dengan penyembelihan binatang. Jika perahu pinisi itu berbobot kurang dari 100 ton, maka binatang yang disembelih adalah kambing, dan jika bobotnya lebih dari 100 ton, maka binatang yang disembelih adalah seekor sapi.

Pada saat peletakan lunas, juga harus disertai prosesi khusus. Saat dilakukan pemotongan, lunas diletakkan menghadap Timur laut. Balok lunas bagian depan merupakan simbol lelaki. Sedangkan balok lunas bagian belakang diartikan sebagai simbol wanita. Usai dimantrai, bagian yang akan dipotong ditandai dengan pahat. Pemotongan yang dilakukan dengan geragaji harus dilakukan sekaligus tanpa boleh berhenti. Itu sebabnya untuk melakukan pemotongan harus dikerjakan oleh orang yang bertenaga kuat. Itulah tahapan-tahapan yang selalu melalui ritual tertentu.

3. Kelompok Pekerja Perahu Pinisi

Di kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari terdapat beberapa pengusaha kelompok pengrajin Perahu Pinisi di mana para pengusaha tersebut mempekerjakan para masyarakat disana yang ahli dalam pembuatan perahu pinisi, seperti pada tabel berikut tertera nama-nama pengusaha Perahu pinisi di kelurahan Tanah Beru :

Tabel. 1
Daftar Pengusaha Perahu Pinisi

No.	Pengusaha Kelompok Pekerja Perahu Pinisi
1.	H. Abdullah Hasan
2.	H. Syarifuddin
3.	H. Suaib
4.	H. Rusli, H. Baso
5.	H. Awan
6.	H. Le'leng
7.	H. Andi Ahmad Nur
8.	H. Damang H. Sakka
9.	H. Buraerah H. Sakka
10.	H. Sukardi H.

E. Kerangka Pikir

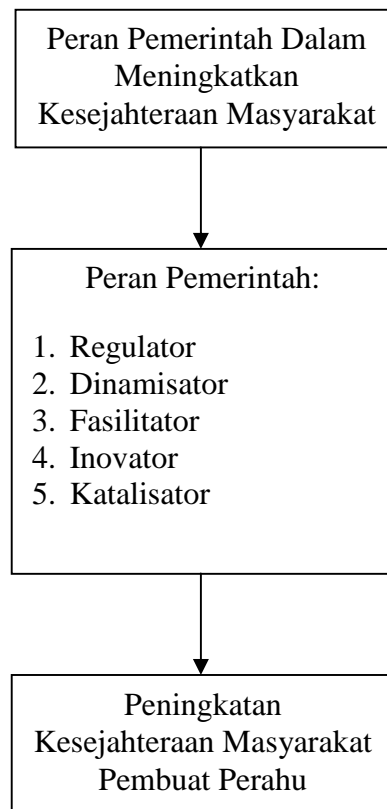
Menurut Nawawi (2013), pemerintah daerah adalah lembaga atau institusi-institusi publik yang mempunyai kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya dalam mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah merupakan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya membangun daerah secara otonom dalam rangka mencapai tujuan baik dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan secara berdaya guna sebagai bagian dari tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tuntut untuk mampu berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai bagian utama dari peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang kehidupan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien dan tanpa tindakan diskriminatif.

Berkaitan dengan peran pemerintah di atas, maka salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah utamanya pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan maksud memberikan bimbingan, dan kemampuan bagi mereka agar dapat ikut serta dalam program-program pembangunan yang dilakukan. Hal ini tentu saja sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah in

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus dalam penelitian ini mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari.

F. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari melalui kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan maksud melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi dalam program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan usaha.
3. Pemerintah sebagai dinamisator dapat diartikan sebagai penggerak bagi masyarakat dimana pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat pekerja perahu dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
4. Pemerintah sebagai fasilitator diartikan sebagai pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.
5. Pemerintah sebagai inovator diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menterjemahkan berbagai macam program dengan bahasan yang sederhana sehingga dapat mengunggah partisipasi masyarakat.
6. Pemerintah sebagai katalisator diartikan bahwa pemerintah harus menjadi agen dalam percepatan pengembangan potensi daerah yang akan menjadi modal sosial untuk menarik partisipasi masyarakat.

7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya taraf hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh para pekerja perahu phinisi baik dari segi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, perumahan yang layak serta makanan yang bergizi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan setelah ujian proposal. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pengambilan lokasi penelitian didasarkan atas: (1) Pemerintah Kelurahan Tanah Beru merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba selaku fasilitator dalam pembangunan terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi dalam naungan kewenangannya; (2) Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Kabupaten Bulukumba dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Tanah Beru. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi didasarkan atas efektivitas dan efisiensi penelitian sebab mudah dijangkau oleh penulis.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan judul penelitian penulis mengenai peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas dan obyektif mengenai kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi berdasarkan observasi dan wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh penulis.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data Utama (primer)

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam kepada para informan yang dimaksud mengenai obyek yang diteliti, termasuk data-data kepegawaian pada Kelurahan Tanah Beru dan data-data lain yang menunjang dalam proses penelitian ini.

2. Data Penunjang (sekunder)

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen dan laporan-laporan tertulis mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui secara jelas mengenai peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari aparat pemerintah Kelurahan Tanah Beru, aparat pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, pengusaha lokal pembuat perahu pinisi dan para pekerja pembuat perahu pinisi yang mengetahui tentang tingkat kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Pekerjaan
1	Hj. Hasmawati, S.Sos	HSM	Lurah Tanah Beru
2	Dra. Hj. Andi Roslinda, M.Si	ARS	Kadis PMD Kab. Bulukumba
3	Dedi Rahmadi, S.STP, M.Si	DRD	Camat Bontobahari
4	H. Rifai, S.Sos	RFI	Sekretaris BAPPEDA Kab. Bulukumba
5	H. Zainuddin, S.Sos	ZND	Kasi. Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontobahari
6	H. Kardi	KRD	Pengusaha Lokal Pembuat Perahu Pinisi
7	H. Syamsul	SYM	Pengusaha Lokal Pembuat Perahu Pinisi
8	Akbar Mustakim	AMK	Pekerja Perahu Pinisi
9	Bahar	BHR	Pekerja Perahu Pinisi

Sumber data: Olahan data sekunder penelitian 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data penelitian secara relevan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Pada metode ini, penulis akan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam terhadap informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bulukumba, Kepala Kecamatan Bontobahari, Kasi. Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Bontobahari, Kepala Kelurahan Tanah Beru, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bontobahari, dan Masyarakat Tanah Beru. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara obyektif mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk informasi dan data yang menunjang dalam penulisan proposal penulis terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 92-99), yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

2. Penyajian Data (*display data*)

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model triangulasi, dimana pada model ini menggunakan setidaknya 3 (tiga) teknik, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan berbagai sumber terhadap obyek yang dimaksud baik melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya melakukan perbandingan hasil yang diperoleh.

2. Triangulasi teknik

Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik yang berbeda namun dengan sumber yang sama baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Apabila hasil yang ditemukan berbeda, maka penulis akan mencoba melakukan sebuah diskusi kepada informan untuk memastikan kebenaran dari sebuah data yang ditemukan.

3. Triangulasi waktu

Data penelitian yang ditemukan belum tentu sama saat waktu pagi, siang dan malam. Oleh karena itu, agar data yang ditemukan sesuai dengan hasil yang diinginkan maka dilakukan pengecekan data pada tiap-tiap waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Keadaan Penduduk Kelurahan Tanah Beru

Masyarakat atau penduduk yang bermukim pada suatu wilayah (desa/kelurahan) sangat menentukan pengembangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh setiap daerah untuk meningkatkan pembangunan sebuah daerah. Demikian halnya penduduk di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari kegiatan pembuatan kapal pinisi dan nelayan. Adapun keadaan penduduk di Kelurahan Tanah Beru berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Keadaan Penduduk Kelurahan Tanah Beru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentasi (%)
1	Laki-laki	2.271	50,07
2	Perempuan	2.265	49,93
	Jumlah	4.536	100

Sumber: Kasi. Kesos dan Kepemudaan Kantor Kelurahan Tanah Beru 2017

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berdomisili di Kelurahan Tanah Beru sebanyak 4.536 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2.271 orang atau sebesar 50,07 persen dan perempuan berjumlah 2.265 orang atau sebesar 49,93 persen. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas penduduk berdasarkan jenis kelamin yang tinggal

dan menetap di Kelurahan Tanah Beru adalah jenis kelamin laki-laki. Adapun keadaan penduduk di Kelurahan Tanah Beru berdasarkan tingkatan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
1	1-12	586	576	1.162	25,62
2	13-24	532	591	1.123	24,76
3	25-36	489	355	844	18,61
4	37-48	415	365	780	17,20
5	49>	249	378	627	13,82
Jumlah		2.271	2.265	4.536	100

Sumber: Kasi. Kesos dan Kepemudaan Kantor Kelurahan Tanah Beru 2017

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk dengan tingkat usia 1-12 tahun berjumlah 1.162 jiwa atau sebesar 25,62 persen dengan jumlah laki-laki sebanyak 586 orang dan perempuan sebanyak 576 orang. Adapun untuk tingkat usia 13-24 tahun berjumlah 1.123 jiwa atau sebesar 24,76 persen dengan jumlah laki-laki sebanyak 532 orang dan perempuan sebanyak 591 orang. Jumlah penduduk dengan tingkat usia antara 25-36 tahun berjumlah 844 atau sebesar 18,61 persen dengan jumlah laki-laki sebanyak 489 orang dan perempuan sebanyak 355 orang. Penduduk dengan tingkat usia antara 37-48 orang berjumlah 780 jiwa atau sebesar 17,20 persen dengan jumlah laki-laki sebanyak 415 orang dan perempuan sebanyak 365 orang. Dan penduduk yang memiliki usia 49 tahun ke atas berjumlah 627 orang atau sebesar 13,82 persen dengan jumlah laki-laki sebanyak 249 orang dan perempuan sebanyak 278 orang. Dengan demikian, maka jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia dan jenis kelamin mayoritas berusia antara 1-12 tahun.

Lebih lanjut keadaan penduduk di Kelurahan Tanah Beru berdasarkan pada tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentasi (%)
1	Belum dan Putus Sekolah	1.185	26,12
2	Tamat SD	1.101	24,27
3	Tamat SMP	898	19,80
4	Tamat SMA	788	17,37
5	Strata 1	564	12,43
	Jumlah	4.536	100

Sumber: Kasi. Kesos dan Kepemudaan Kantor Kelurahan Tanah Beru 2017

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan belum dan putus sekolah berjumlah 1.185 orang atau sebesar 26,12 persen. Penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1.101 orang atau sebesar 24,27 persen sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 898 orang atau sebesar 19,80 persen. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 788 orang atau sebesar 17,37 persen dan penduduk dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 564 orang atau sebesar 12,43 persen. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tanah Beru mayoritas belum dan putus sekolah yakni berjumlah 1.185 orang. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen pemerintah (Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) termasuk partisipasi dari tokoh masyarakat (pendidikan dan agama) untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Adapun keadaan penduduk di Kelurahan Tanah Beru berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentasi (%)
1	PNS	24	13,19
2	Pembuat Kapal	75	41,21
3	Nelayan	45	24,73
4	Pembantu Rumah Tangga	2	1,10
5	TNI	2	1,10
6	Pedagang	34	18,68
Jumlah		182	100

Sumber: Kasi. Kesos dan Kepemudaan Kantor Kelurahan Tanah Beru 2017

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yaitu PNS, pembuat kapal, nelayan, pembantu rumah tangga, TNI, dan pedagang. Adapun penduduk dengan mata pencaharian PNS berjumlah 24 orang atau sebesar 13,19 persen, sedangkan penduduk dengan pencaharian pembuat kapal berjumlah 75 orang atau sebesar 41,21 persen. Penduduk dengan pencaharian nelayan berjumlah 45 orang atau sebesar 24,73 persen, sedangkan penduduk dengan mata pencaharian pembantu rumah tangga berjumlah 2 orang atau sebesar 1,10 persen. Adapun penduduk dengan mata pencaharian TNI sebanyak 2 orang atau sebesar 1,10 persen, sedangkan penduduk dengan mata pencaharian pedagang dengan jumlah 34 orang atau sebesar 18,68 persen. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Tanah Beru didominasi oleh penduduk dengan pekerjaan sebagai pembuat perahu pinisi. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi

mereka yang berprofesi sebagai pembuat perahu khususnya bagi para masyarakat pengusaha lokal yang berada di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

2. Keadaan Pegawai Kantor Kelurahan Tanah Beru

Jumlah pegawai yang berada di Kantor Kelurahan Tanah Beru berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi. Ekbang dan PP, Kasi. Kesos dan Kepemudaan, Kasi. Pemerintahan serta seorang staf. Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (Orang)	Presentasi (%)
1	Lurah	1	16,6
2	Sekretaris Lurah	1	16,6
3	Kepala Seksi	3	50
4	Staf	1	16,6
Jumlah		6	100

Sumber: Kasi. Pemeirntahan Kantor Kelurahan Tanah Beru Tahun 2018

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan jabatan sebagai Kepala Kelurahan berjumlah 1 (satu) orang atau sebesar 16,6 persen sedangkan untuk jabatan Sekretaris Lurah berjumlah 1 (satu) orang atau sebesar 16,6 persen. Adapun untuk pegawai dengan jabatan sebagai Kepala Seksi berjumlah 3 (tiga) orang atau sebesar 50 persen dan staf berjumlah 1 (orang) atau sebesar 16,6 persen. Kepala seksi pada Kelurahan Tanah Beru terbagi atas Kasi. Ekbang dan PP, Kasi. Kesos dan Kepemudaan serta Kasi

Pemerintahan, masing-masing kepala seksi bertugas sesuai dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan.

Lebih lanjut keadaan pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Presentasi (%)
1	III	5	83,3
2	II	1	16,6
Jumlah		6	100

Sumber: Kasi. Pemeirntahan Kantor Kelurahan Tanah Beru Tahun 2018

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat golongan ruang III berjumlah 5 (lima) orang atau sebesar 83,3 persen, sedangkan pegawai dengan tingkat golongan II berjumlah 1 (satu) orang atau sebesar 16,6 persen. Lebih lanjut keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentasi (%)
1	SLTA	3	50
2	S1	3	50
Jumlah		6	100

Sumber: Kasi. Pemeirntahan Kantor Kelurahan Tanah Beru Tahun 2018

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 3 (tiga) orang atau sebesar 50 persen, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 3 (tiga) orang atau sebesar 50 persen.

B. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan/kelurahan. Baik dari segi pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat yang merupakan hal terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendorong peningkatan kemandirian masyarakat lokal.

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait peran pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari. Setidaknya penulis memaparkan beberapa peran pemerintah yang dianggap sangat berpengaruh dalam meningkatkan dan mendorong kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi yaitu sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, inovator, dan katalisator. Kesemua peran tersebut harus dapat dijalankan secara optimal agar mampu menciptakan pola hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dalam turut menyukseskan program-program pembangunan khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Beru baik jangka pendek, menengah bahkan jangka panjang.

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yang dimaksud dalam penulisan ini adalah setiap usaha dan upaya pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembuatan regulasi tersebut, diharapkan agar setiap pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Tanah Beru akan mampu meningkatkan status ekonomi, kesehatan dan pendidikan terhadap masyarakat.

Adapun peran pemerintah sebagai regulator dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru dapat dibagi ke dalam dua hal penting yaitu; (a) bagaimana pemerintah membuat regulasi tentang percepatan pembangunan melalui program-program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan; dan (b) membuat kebijakan-kebijakan usaha bagi para pengusaha lokal agar mampu mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan masyarakat sekitarnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat kecil (khususnya para pekerja pembuat perahu pinisi) tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

a. Program pemberdayaan masyarakat

Salah satu cara atau strategi yang dianggap oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) cukup berpengaruh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan atau kelurahan adalah dengan melakukan dan merealisasikan berbagai bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Khusus untuk di wilayah Kelurahan Tanah Beru yang sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai pekerja pembuat perahu pinisi, maka setidaknya program-program pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat bantuan sosial kepada para keluarga pembuat perahu pinisi sebagai penunjang ekonomi mereka.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu HSM, selaku Lurah Tanah Beru terkait program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sampai sejauh ini program pemberdayaan kepada masyarakat pekerja perahu pinisi di kelurahan ini baru sebatas pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri dalam hal pembuatan souvenir perahu pinisi bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Itupun sebelumnya mereka diberikan bekal pendidikan dan pelatihan mengenai bagaimana cara membuat souvenir ini agar memiliki nilai jual yang cukup tinggi”. (Hasil wawancara dengan Ibu HSM, pada tanggal 20 September 2018).

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa sejauh ini program-program pemberdayaan masyarakat bagi para keluarga pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru baru sebatas pada pembentukan kelompok-kelompok mandiri yang berorientasi kepada pembuatan souvenir perahu pinisi. Namun sebelumnya para kelompok usaha mandiri ini diberikan pelatihan mengenai pembuatan souvenir agar dapat memiliki nilai jual dan menarik sehingga dapat memikat minat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Hal ini sudah sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa kelompok-kelompok usaha mandiri ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dalam rangka

meningkatkan penghasilan bagi keluarga pekerja perahu pinisi. Souvenir yang dibuat tersebut, dijual kepada para masyarakat dan wisatawan dengan harga mulai dari Rp. 80.000 ke atas tergantung pada jenis dan ukuran serta tingkat kesulitan yang dibuat. Menurut pantauan penulis selama di lapangan, usaha ini memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Tanah Beru sebab sampai sejauh ini souvenir yang diperdagangkan masih menjadi incaran bagi para wisatawan terutama bagi wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di kawasan tersebut. Hanya saja, perlu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh komponen pemerintah termasuk mengenai pembuatan kebijakan yang lebih berorientasi pada pengembangan usaha lokal agar para kelompok-kelompok usaha mandiri ini dapat meningkatkan produksinya sehingga akan mendorong tingkat ekonomi dan pendapatan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu ARS, selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba terkait program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Saya kira program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini tergantung pada OPD-OPD yang bersinggungan erat dengan program ini termasuk para pekerja perahu pinisi dan para pengusaha lokal atau dengan kata lain yang sesuai dengan bidang tugasnya. Seperti melakukan kegiatan penyuluhan tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif atau bisa juga melalui pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja perahu pinisi agar dapat mandiri dan memiliki bekal pengetahuan di bidang pembuatan kapal pinisi”. (Hasil wawancara dengan Ibu ARS, pada tanggal 20 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program-program pemerintah tentang pemberdayaan

masyarakat khususnya bagi para pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru tergantung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan program ini. Ditambahkan oleh informan bahwa program pemberdayaan masyarakat pekerja perahu pinisi dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat pekerja perahu pinisi untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan dapat pula berupa kegiatan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat pekerja pinisi dengan harapan agar mereka dapat memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pembuatan kapal yang pada gilirannya akan melahirkan kemandirian usaha.

Selain wawancara diatas penulis juga menemukan hasil di lapangan bahwa dalam program pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kelompok pekerja perahu pinisi (Pengusaha Perahu Pinisi) di Kelurahan Tanah Beru, dimana beberapa kelompok pengrajin perahu di bawah perusahaan atau proyek perahu seperti Cv. Bintang Jaya, Cv. Cahaya Harapan dan perusahaan industri lainnya

Tabel 3.4
Kelompok Pengusaha Perahu Pinisi

No.	Pengusaha Kelompok Pekerja Perahu Pinisi		
. 1.	H. Abdullah Hasan	6.	H. Le'leng
2.	H. Syarifuddin	7.	H. Andi Ahmad Nur
3.	H. Suaib	8.	H. Damang H. Sakka
4.	H. Rusli, H. Baso	9.	H. Buraerah H. Sakka
5.	H. Awan	10.	H. Sukardi H

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat beberapa kelompok pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru, dimana para kelompok pekerja perahu tersebut di dalam hal kerja sama dilakukan dengan membuka jaringan akses komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba dan juga berinteraksi dengan bank sebagai mitra dalam persoalan permodalan. Dahulu di Kelurahan Tanah Beru tersedia Koperasi Pengrajin Perahu (KOPENGPERA) dimana koperasi ini menyediakan bantuan modal ataupun alat kerja langsung kepada kelompok pekerja perahu pinisi, namun koperasi tersebut sudah tidak berjalan lagi. Maka dari itu para pengusaha pengrajin perahu tersebut menggunakan jaringan dengan pemerintah setempat dalam hal pencarian investor (pembeli perahu) dalam pemodalan pembuatan perahu pinisi

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh beberapa informan di atas terkait program pemberdayaan masyarakat pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Sulistiyani (2004), bahwa konsep pemberdayaan dapat dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekuatan dan kemampuan dan atau pemberian daya dari pihak yang memiliki daya (pemerintah) kepada pihak yang kurang atau tidak memiliki daya (masyarakat), maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut sampai saat ini hanya dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan dalam pemberian daya kepada masyarakat dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada para pekerja perahu pinisi termasuk keluarga mereka untuk dapat menciptakan ekonomi kreatif dan usaha-usaha mandiri lainnya. Hal ini dilakukan

karena kegiatan penyuluhan dan pelatihan tersebut dianggap sebagai program yang tepat untuk direalisasikan saat ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui OPD-OPD yang terkait kepada para masyarakat pekerja perahu pinisi dan keluarganya.

b. Kebijakan usaha

Kebijakan usaha yang dimaksud disini adalah adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang lebih berpihak kepada masyarakat pekerja perahu pinisi dan para pengusaha lokal yang berada di Kelurahan Tanah Beru sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi mereka termasuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pengusaha lokal untuk berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Disamping itu dengan adanya kebijakan atau program yang lebih berorientasi kepada pengembangan usaha pembuatan kapal pinisi kepada masyarakat lokal akan memberikan asumsi yang positif bagi pemerintah termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal untuk turut serta memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap berbagai program-program pemerintah itu sendiri. Jadi pada prinsipnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melalui OPD-OPD yang terkait terhadap masyarakat pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru adalah untuk kepentingan jangka panjang pemerintah daerah itu sendiri.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak DRD, selaku Camat Bontobahari terkait kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha pembuatan perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru adalah sebagai berikut:

“Salah satu kebijakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba ini adalah dengan mengadakan kegiatan festival atau event perahu pinisi. Kegiatan ini tentu saja sebagai sarana untuk memperkenalkan perahu pinisi secara lebih luas kepada masyarakat termasuk wisatawan mancanegara. Program ini dianggap cukup efektif untuk mendorong kemajuan industri pariwisata dan terlebih lagi akan mampu meningkatkan kemajuan industri perkapalan di Kabupaten Bulukumba ini. Sebab dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan para investor baik lokal maupun asing akan tertarik untuk memesan kapal pinisi atau bahkan menanamkan modalnya pada pengusaha-pengusaha lokal pembuat perahu pinisi termasuk di Tanah Beru”. (Hasil wawancara dengan Bapak DRD, pada tanggal 24 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan festival perahu pinisi sebagai media untuk memperkenalkan warisan budaya daerah kepada para masyarakat dan para wisatawan mancanegara secara lebih luas dengan harapan agar kegiatan festival ini mampu meningkatkan industri pariwisata termasuk industri perkapalan yang terdapat di Kelurahan Tanah Beru dan Tana Lemo. Khusus untuk industri perkapalan di Kabupaten Bulukumba, tentu saja akan mampu menarik minat para investor baik lokal maupun asing untuk memesan kapal pinisi bahkan menanamkan modalnya kepada para pengusaha-pengusaha lokal pembuat perahu pinisi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat pekerja perahu pinisi.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa kegiatan festival perahu pinisi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapat di bidang industri perkapalan. Kegiatan ini dijadikan sebagai kegiatan tahunan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka mendorong kemajuan pengusaha lokal pembuat perahu pinisi. Bahkan saat ini perahu pinisi dijadikan sebagai warisan budaya takbenda

oleh UNESCO, sehingga diharapkan akan mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan industri perkapalan di Kabupaten Bulukumba terlebih lagi kepada peningkatan pendapatan para masyarakat pekerja perahu pinisi.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak RFI, selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Bulukumba terkait kebijakan pemerintah terhadap pengembangan usaha pembuatan perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru adalah sebagai berikut:

“Kalau kebijakan pemerintah yang sifatnya tertulis itu belum ada, karena sampai saat ini masih dalam proses usulan kebijakan. Usulan kebijakannya berupa pelarangan kepada para pengusaha asing untuk mendirikan industri perkapalan di daerah Bulukumba dengan menjual perahu pinisi di bawah standar. Karena dianggap akan mematikan pengusaha lokal yang ada termasuk di Kelurahan Tanah Beru yang pada gilirannya akan semakin mempersulit masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka”. (Hasil wawancara dengan Bapak RFI, pada tanggal 24 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap pengembangan usaha pembuatan perahu pinisi masih bersifat usulan kebijakan dan belum berbentuk dalam peraturan daerah. Ditambahkan oleh informan bahwa usulan kebijakan ini berisi tentang pelarangan pengusaha asing untuk mendirikan usaha/industri perkapalan pinisi karena dianggap akan mematikan pengusaha lokal khususnya di wilayah Tanah Beru dan Tana Lemo yang merupakan pusat pembuatan perahu pinisi di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, usulan kebijakan ini didasarkan pada berbagai laporan para pengusaha lokal dan masyarakat pekerja perahu pinisi yang semakin khawatir akan maraknya para pengusaha asing yang ingin mendirikan industri perkapalan pinisi dan menjualnya dengan harga di bawah standar (lebih murah).

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan oleh informan di atas maka penulis mengaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Dwijowijoto dan Wrihatnol (2006) tentang peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penertiban peraturan-peraturan, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini kebijakan usaha pembuatan perahu pinisi bagi para pengusaha lokal dan masyarakat pekerja perahu pinisi khususnya di wilayah Tanah Beru dan Tana Lemo belum direalisasikan dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini juga yang membuat para pengusaha asing dapat bergerak bebas dalam mengembangkan industri perkapalan pinisi karena tidak adanya aturan yang mengikat secara hukum terkait kebijakan usaha ini. Dampaknya tentu akan kembali kepada para pengusaha-pengusaha lokal yang berada di wilayah tersebut (Tanah Beru dan Tana Lemo), termasuk pemasukan atau profit yang semakin menurun disebabkan oleh semakin minimnya pemesanan perahu pinisi kepada pengusaha lokal.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai penggerak bagi masyarakat dimana pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya bagi para pengusaha dan pekerja perahu pinisi yang berada di Kelurahan Tanah Beru. Adapun peran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dapat berbentuk program penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang

cukup sebagai pendorong dalam memajukan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga bagi para pekerja perahu pinisi. Hal ini dianggap perlu karena sebagian besar masyarakat yang berada di Kelurahan Tanah Beru berprofesi sebagai pekerja perahu dan nelayan.

a. Kegiatan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dimaksud disini adalah suatu proses kegiatan atau cara yang dijalankan oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba baik pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan atau organisasi dinas pemerintah yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam memberikan keterangan dan informasi yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pekerja dan keluarga pembuat perahu pinisi sehingga dapat membentuk opini mereka tentang perlunya peningkatan kualitas hidup melalui kemandirian ekonomi. Selain itu, penyuluhan ini merupakan wadah bagi para pekerja perahu pinisi untuk menuangkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi termasuk usulan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu ARS, selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba terkait dengan program-program penyuluhan masyarakat pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru adalah sebagai berikut:

“Kalau program kegiatan penyuluhan kepada masyarakat itu memang dilakukan secara berkelanjutan. Karena ini merupakan salah satu upaya untuk merubah pola pikir masyarakat itu sendiri agar mampu meningkatkan kapasitas dirinya termasuk keluarga. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini adalah awal untuk menjembatani kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pelatihan dan pemberian keterampilan yang

sesuai dengan kondisi pekerjaan yang mereka tekuni”. (Hasil wawancara dengan Ibu ARS, pada tanggal 25 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa program kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya kepada para pekerja perahu pinisi merupakan program yang rutin dilakukan baik oleh Dinas PMD bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Tanah Beru dengan tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat pekerja perahu pinisi dan keluarga akan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas hidup mereka, ditambahkan oleh informan bahwa kegiatan penyuluhan ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memberikan pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan profesi kerja yang ditekuni sebagai modal dasar agar dapat mendorong kemandirian usaha dan menciptakan ekonomi kreatif termasuk masyarakat yang berada di Kelurahan Tanah Beru.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini OPD-OPD yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan senantiasa melakukan penyuluhan terhadap masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Penyuluhan yang dilakukan biasanya berisi informasi-informasi peningkatan sumber daya manusia, bahkan informasi mengenai sumbangan atau bantuan dana dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Hanya saja, penulis melihat bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut hanya dianggap sebagai formalitas dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab yang harus segera diselesaikan oleh aparat pemerintah atau tim penyuluh. Padahal

semestinya program penyuluhan ini mampu mendorong masyarakat untuk merubah pola pikir dan kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik sehingga secara bertahap akan mampu meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dan seimbang.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak KRD, selaku pengusaha lokal pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terkait dengan program-program penyuluhan masyarakat pekerja perahu pinisi adalah sebagai berikut:

“Biasanya yang datang adalah tim penyuluh dari pemerintah Kabupaten Bulukumba didampingi dengan pemerintah setempat. Mereka datang untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana masyarakat harus senantiasa aktif dan ikut dalam program pemberdayaan. Hanya saja kami berharap agar kegiatan penyuluhan ini tidak sebatas pada penyampaian informasi mengenai program-program pemberdayaan tetapi juga inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan kreativitas masyarakat dan keluarga para pekerja perahu pinisi”. (Hasil wawancara dengan Bapak KRD, pada tanggal 25 September 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait, biasanya dalam bentuk himbuan agar masyarakat senantiasa ikut dan berpartisipasi dalam setiap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat (kelurahan dan kecamatan) maupun program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Hanya saja menurut informan, bahwa program penyuluhan yang dilakukan tersebut tidak hanya sebatas pada penyampaian program belaka akan tetapi ada semacam pemberian solusi terhadap masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat pekerja perahu pinisi dan

keluarganya termasuk adanya inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja perahu pinisi dan para pengusaha lokal.

Berdasarkan penjelasan oleh kedua informan di atas, maka penulis mengaitkan dengan teori Dwijowijoto dan Wrihatnolo (2006) mengenai peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional sebagai Dinamisator bahwa peran pemerintah adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif yang diwujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu memberikan pelatihan. Maka dari sini penulis berkesimpulan bahwa program-program penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berkaitan dengan teori tersebut namun pemerintah harus lebih efektif lagi dalam arti penyampaian informasi kepada masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh para pekerja perahu pinisi utamanya yang berada di Kelurahan Tanah Beru dan Tana Lemo dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pembuat perahu pinisi. Disamping itu perlu ada solusi dan inovasi yang dapat mendorong mereka ke arah peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

b. Pelatihan

Pelatihan yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman para pekerja perahu pinisi sehingga dapat memberikan bekal bagi mereka dan keluarganya untuk menciptakan usaha-usaha kreatif seperti pelatihan keterampilan pembuatan

aksesoris perahu pinisi, pembuatan souvenir dan lain-lain sebagainya yang dapat bernilai jual tinggi sehingga mampu menambah penghasilan para keluarga pekerja perahu pinisi. Atau pemberian pengetahuan tentang pembuatan perahu pinisi yang memadukan antara teknik tradisional dan teknik modern sehingga hasil pembuatan perahu pinisi lebih berkualitas dan tidak memakan banyak waktu dalam pembuatannya.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak AMK, selaku pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terkait pemberian pelatihan dan keterampilan adalah sebagai berikut:

“Sampai saat ini baru sampai pelatihan teknik membaca gambar desain perahu pinisi dan juga pelatihan perakitan perahu pinisi di lapangan. Itupun tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga para pekerja disini masih belum paham akan pelatihan keterampilan yang diberikan dan tetap kembali menggunakan cara kerja tradisional yang diperoleh dari para leluhur secara turun temurun. Selain itu, besar juga harapan kami agar program pelatihan keterampilan bukan saja diperuntukkan untuk para pekerja, tetapi juga bagi keluarganya agar mereka juga bisa membuka peluang usaha baru”. (Hasil wawancara dengan Bapak AMK, pada tanggal 26 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan keterampilan para pekerja perahu pinisi selama ini hanya diperuntukkan bagi para pekerja perahu pinisi seperti pelatihan membaca gambar desain dan pelatihan merakit perahu. Ditambahkan oleh informan bahwa, semestinya kegiatan-kegiatan ini harus pula melibatkan masyarakat secara umum (keluarga pekerja) dengan memberikan bekal keterampilan pada bidang atau orientasi yang berbeda dengan para pekerja perahu pinisi dalam arti keterampilan kewirausahaan, sehingga mampu mendorong para keluarga pekerja untuk

membuka lahan pekerjaan baru dan tidak sepenuhnya menggantungkan kebutuhan hidup mereka dari para pekerja perahu pinisi saja.

Hal ini sesuai dengan hasil pantauan penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap para pekerja perahu pinisi belum efektif. Hal ini disebabkan karena program-program pelatihan yang dilakukan hanya difokuskan kepada para pekerja perahu pinisi saja dan tidak memberikan bekal keterampilan kepada keluarga pekerja. Padahal jika kita melihat secara obyektif, maka program pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya ditujukan pada satu obyek saja akan tetapi seluruh masyarakat dengan harapan akan lebih memberikan peluang yang lebih besar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup mereka. Disamping itu, dengan adanya pemberian bekal keterampilan dengan orientasi berbeda kepada para keluarga pekerja bukan tidak mungkin akan melahirkan ekonomi kreatif yang mandiri dan pada gilirannya akan mampu membuka peluang pekerjaan baru. Alasan selanjutnya mengapa penulis mengatakan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba belum berjalan secara maksimal adalah karena kegiatan ini tidak dilakukan secara berkelanjutan, padahal kegiatan-kegiatan semacam ini jauh lebih penting bila dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan sebab ada praktik secara langsung yang diberikan kepada masyarakat dan bukan sekedar dalam bentuk konsep belaka.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu HSM, selaku Lurah Tanah Beru terkait dengan program pelatihan dan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat pekerja perahu pinisi adalah sebagai berikut:

“Memang sampai saat ini kegiatan-kegiatan semacam itu masih jarang dilakukan, sebelumnya saya pernah katakan bahwa di kelurahan ini sudah ada kelompok-kelompok usaha mandiri yang diperuntukkan untuk para pekerja perahu pinisi dalam pembuatan souvenir, hanya saja waktu untuk pengerjaan souvenir ini terkadang terkendala pada pekerjaan utama mereka. Makanya kami pernah mengusulkan kepada pemerintah Kecamatan Bontobahari agar keluarga mereka yang diberikan pelatihan dan keterampilan kewirausahaan agar mampu membantu ekonomi keluarga”. (Hasil wawancara dengan Ibu HSM, pada tanggal 26 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan pelatihan dan keterampilan yang diberikan masih jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan karena melihat kesibukan para pekerja perahu yang terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaan sebuah perahu pinisi sehingga pemberian pelatihan menjadi terkendala. Disamping itu, pemberian pelatihan dan keterampilan yang dilakukan lebih banyak berorientasi kepada keterampilan teknis pembuatan perahu bila dibandingkan dengan pemberian pelatihan dan keterampilan kewirausahaan khususnya kepada keluarga pekerja.

Berdasarkan uraian dari kedua informan di atas mengenai pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap para pekerja perahu pinisi khususnya di Kelurahan Tanah Beru dengan dikaitkan teori Dwijowijoto dan Wrihatnolo (2006) mengenai peran pemerintah dalam konteks pembangunan nasional sebagai Dinamisator bahwa peran pemerintah adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses

pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan secara intensif dan efektif yang diwujudkan mealalui tim penyuluhan maupun badan tertentu memberikan pelatihan, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada para pekerja perahu pinisi masih belum efektif sesuai dengan teori di atas tersebut pemerintah harus mampu memberikan manfaat yang berarti bagi mereka. Selain itu, pelatihan keterampilan yang diberikan haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan dalam menangkap dan memahami setiap pelatihan yang diberikan agar dapat mendorong perekonomian mereka. Mampu menciptakan lahan kerja baru khususnya bagi keluarga pekerja perahu pinisi seperti pembuatan souvenir, aksesoris perahu pinisi dan yang berkaitan dengan ikon tersebut sehingga dapat bernilai ekonomis dan menguntungkan bagi masyarakat.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan. Dari segi pendampingan pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, pemerintah Kabupaten Bulukumba selain sebagai penggerak di bidang tersebut harus juga mampu mendampingi masyarakat khususnya para pekerja perahu pinisi dan keluarganya agar program-program tersebut dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sedangkan dalam hal pendanaan atau permodalan, pemerintah dapat memberikan

bantuan modal usaha kepada para pengusaha lokal pembuat perahu pinisi maupun para keluarga pekerja perahu pinisi yang ingin bergerak dalam bidang kewirausahaan dengan harapan mewujudkan ekonomi kreatif yang mandiri dan memajukan sektor-sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan kuliner. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap wilayah.

a. Kegiatan pendampingan usaha

Kegiatan pendampingan usaha dimaksudkan agar kegiatan atau program-program pemberdayaan masyarakat senantiasa searah dengan tujuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Akan memudahkan bagi pihak pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi yang efektif serta memberikan inovasi kepada masyarakat yang didampingi. Di satu sisi, masyarakat akan termotivasi dalam meningkatkan usaha-usaha mandiri karena merasa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak BHR, selaku pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terkait dengan kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

“Kalau soal pendampingan usaha memang ada karena di daerah ini terbentuk kelompok-kelompok usaha mandiri. Cuma tidak rutin didampingi, biasa hanya sebulan sekali itupun hanya menanyakan sejauh mana usaha ini berjalan. Padahal yang kami inginkan itu ada semacam diskusi tentang bagaimana usaha mandiri ini bisa maju atau apa masalah

yang sedang kami hadapi”. (Hasil wawancara dengan Bapak BHR, pada tanggal 27 September 2018).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa sejauh ini pendampingan usaha mandiri bagi para pekerja perahu pinisi yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba belum rutin dilakukan terhadap para kelompok-kelompok usaha mandiri khususnya yang berada di Kelurahan Tanah Beru. Ditambahkan oleh informan bahwa sesungguhnya yang mereka inginkan adalah adanya pendampingan yang dilakukan secara lebih intens agar setiap masalah-masalah atau kendala yang dihadapi para pekerja perahu pinisi melalui usaha mandiri dapat diselesaikan melalui forum diskusi bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Keterangan di atas sesuai dengan hasil pengamatan penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa pendampingan usaha tersebut sangat jarang dilakukan oleh aparat pemerintah baik dari pihak kelurahan, kecamatan dan pemerintah kabupaten. Padahal menurut hemat penulis, kegiatan-kegiatan semacam ini sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha para kelompok usaha tersebut dan apa yang mereka butuhkan termasuk mencari solusi bersama apabila terjadi kendala baik yang bersifat teknis maupun finansial. Selain itu, kegiatan pendampingan usaha merupakan salah satu wujud untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha mandiri yang dibentuk termasuk di Kelurahan Tanah Beru dan Tana Lemo yang merupakan pusat pembuatan perahu pinisi sekaligus sebagai kontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak DRD, selaku Camat Bontobahari Kabupaten Bulukumba terkait dengan kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

“Perlu kami perjelas disini bahwa kegiatan pendampingan usaha bagi para kelompok-kelompok usaha mandiri ini tujuannya adalah untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat tersebut. Oleh karena itu pendampingan juga harus disesuaikan dengan tingkat progresifitas kelompok usaha yang ada khususnya di Kelurahan Tanah Beru. Dimana ada kelompok usaha yang memang intens dilakukan pendampingan karena dianggap belum mampu untuk dikelola secara mandiri atau boleh dikatakan masih sangat memerlukan bantuan dari pihak pemerintah adapula yang tingkat intensitas pendampingannya dikurangi karena dianggap sudah cukup mandiri. Jadi bukan karena pihak pemerintah itu jarang melakukan pendampingan usaha tetapi dilihat berdasarkan kemajuan dari kelompok usaha tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak DRD, pada tanggal 27 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba didasarkan pada sejauh mana progresifitas dari sebuah kelompok usaha mandiri yang ada termasuk di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari. Dilanjutkan oleh informan bahwa terkadang terdapat kelompok usaha mandiri yang memerlukan pendampingan secara lebih intens karena dianggap belum mampu untuk dikelola secara mandiri, ada pula kelompok usaha mandiri yang dianggap sudah cukup berkembang sehingga intensitas pendampingannya dikurangi agar tidak sampai menimbulkan ketergantungan bahkan untuk menghindari adanya intervensi secara berlebihan dari oknum-oknum pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka dikaitkan dengan teori peran pemerintah sebagai fasilitator yang di kemukakan oleh Dwijiwijoto dan Wrihatnolo (2006) sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi

yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, serta pendanaan atau permodalan, maka dari teori dan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pendampingan usaha yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terhadap para kelompok usaha mandiri khususnya yang berada di Kelurahan Tanah Beru bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi progresifitas dari kegiatan usaha tersebut selain sebagai wujud bantuan moril sehingga mereka dapat termotivasi untuk meningkatkan usaha-usaha mandiri tersebut. Selain itu, kegiatan pendampingan ini dilakukan berdasarkan pada sejauhmana perkembangan usaha mandiri yang mereka lakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila usaha mandiri tersebut dinilai sudah cukup berkembang, maka intensitas pendampingannya pun akan dikurangi dan sebaliknya apabila usaha tersebut dinilai masih sangat membutuhkan pendampingan dari pihak pemerintah maka, akan dilakukan pendampingan secara lebih intens agar dapat mandiri sebagaimana kelompok-kelompok usaha lainnya yang telah lebih dulu berkembang.

b. Pemberian bantuan modal usaha

Pemberian bantuan modal usaha kepada para kelompok usaha yang berada di Kelurahan Tanah Beru dimaksudkan untuk mendorong percepatan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga secara bertahap akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberian bantuan modal usaha ini dapat

dalam bentuk uang tunai sebagai modal awal dalam merintis usaha dan keperluan-keperluan usaha yang dibutuhkan oleh pada kelompok usaha maupun yang bersifat alat yang dapat membantu pembuatan kapal perahu pinisi. Dalam pemberian bantuan modal usaha ini, pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak dapat bertindak diskriminatif akan tetapi harus lebih bersifat obyektif dan bertindak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya bagi para pengusaha lokal dan para pekerja perahu pinisi.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak RFI, selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Bulukumba terkait bantuan modal usaha kepada para pengusaha lokal dan pekerja perahu pinisi adalah sebagai berikut:

“Kalau bantuan semacam itu jelas ada, hanya saja diseleksi terlebih dahulu mana yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Bantuan ini kebanyakan berupa alat-alat produksi seperti genset, mesin las, mesin bubut, dan mesin sekat yang dapat membantu operasional produksi kelompok-kelompok usaha mandiri termasuk di Kelurahan Tanah Beru. Jadi perlu digaris bawahi bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tidak serta merta diberikan kepada seluruh kelompok usaha dan pengusaha lokal itu, harus dilihat berdasarkan tingkat kemapanan usahanya. Tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan kepada para pengusaha lokal yang sudah mapan, harusnya bantuan ini lebih diperuntukkan kepada para pengusaha lokal yang baru merintis usahanya”. (Hasil wawancara dengan Bapak RFI, pada tanggal 28 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberian bantuan modal usaha kepada para pengusaha lokal dan para pekerja perahu pinisi didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dimana bantuan ini hanya dapat diberikan kepada para pengusaha lokal yang baru mulai merintis usahanya dengan maksud memberikan bantuan awal agar mereka dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha lokal lainnya. Disamping itu bantuan ini lebih banyak berbentuk bantuan alat-alat teknis operasional seperti mesin genset, mesin

las, mesin bubut, dan mesin sekat yang sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran dalam pembuatan kapal perahu pinisi. Ditambahkan oleh informan bahwa bantuan ini tidak diperuntukkan kepada para pengusaha lokal yang telah mapan karena dianggap telah mampu untuk mandiri.

Namun hal berbeda ditemukan oleh penulis selama berada di lapangan yang menemukan bahwa bantuan modal usaha kepada para kelompok-kelompok usaha yang ada sampai saat ini tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Kelurahan Tanah Beru bahkan berdasarkan informasi yang diterima dari salah seorang informan sampai saat ini usaha yang dirintisnya tidak pernah mendapatkan bantuan modal termasuk bantuan berupa alat-alat produksi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kurangnya data dan informasi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait dengan para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dalam menyeleksi setiap data dan informasi mengenai pihak-pihak mana saja yang membutuhkan bantuan tersebut agar bantuan ini tepat sasaran.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak SYM, selaku pengusaha lokal pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru terkait bantuan modal usaha kepada para pengusaha lokal dan pekerja perahu pinisi adalah sebagai berikut:

“Sampai sejauh ini saya belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha termasuk bantuan alat-alat produksi dari pemerintah setempat. Tapi kalau ada pengusaha lokal yang mendapatkan bantuan modal usaha saya kurang tahu. Padahal saya berharap bisa juga mendapatkan bantuan tersebut, karena masih banyak yang perlu dilengkapi untuk menunjang kelancaran

produksi”. (Hasil wawancara dengan Bapak SYM, pada tanggal 28 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa sampai sejauh ini pemberian bantuan modal usaha baik kepada para pengusaha lokal maupun kepada kelompok-kelompok usaha yang berada di Kelurahan Tanah Beru tidak efektif bahkan cenderung tidak transparan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang diberikan oleh salah seorang informan yang menjelaskan bahwa sampai saat ini usaha yang baru dirintisnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Sehingga terkadang agak kesulitan dalam memproduksi bahan-bahan dalam pembuatan perahu pinisi dikarenakan minimnya alat yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya bantuan modal usaha kepada para pengusaha lokal dan masyarakat (pekerja perahu pinisi) harus dapat mendorong tingkat ekonomi mereka dalam arti bahwa bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan yang tidak tepat sasaran justru akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial diantara warga masyarakat di Kelurahan Tanah Beru yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial. Perlu ada evaluasi dalam pemberian bantuan modal usaha ini termasuk transparansi dan obyektivitas terkait para pelaku usaha dan para pekerja perahu pinisi yang berhak untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

4. Peran Pemerintah Sebagai Inovator

Pemerintah sebagai inovator diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menterjemahkan berbagai macam program dengan bahasan yang sederhana sehingga dapat mengunggah partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus mampu tampil sebagai pihak yang memberikan masukan atau pandangan yang lebih kreatif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pekerja perahu pinisi yang berada di Kelurahan Tanah Beru, menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, mampu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat dan sebagai agen yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah dan keluhan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan metode-metode pendekatan yang lebih efektif dan variatif (tidak monoton) berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sekaligus memudahkan masyarakat untuk memahami maksud dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah.

a. Metode peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi

Metode dapat diartikan sebagai sebuah cara atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mengenali inti dari sebuah problem atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga melahirkan solusi yang tepat tentang masalah tersebut. Adapun metode yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat masalah yang dihadapi.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak ZND, selaku Kasi. Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontobahari terkait metode

peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi adalah sebagai berikut:

“Biasanya ada 3 (tiga) metode yang umum kami gunakan, yang pertama adalah melalui penyadaran, yang kedua melalui pengkapasitasan baik manusia maupun lembaga/kelompok-kelompok usaha yang dibentuk dan terakhir adalah dengan menggunakan metode pendayaan. Ketiga hal tersebut dilakukan sebagai wujud upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para pekerja perahu pinisi pada khususnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak ZND, pada tanggal 21 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) metode yang dianggap cukup efektif oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yaitu; (1) melakukan penyadaran, dalam arti bahwa pemerintah melakukan proses sosialisasi terhadap masyarakat pekerja perahu termasuk kepada para pengusaha lokal pembuat perahu pinisi agar mereka mengerti betapa pentingnya program pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan dilakukan secara mandiri; (2) melalui pengkapasitasan, dalam arti bahwa sebelum proses pemberdayaan dilakukan, masyarakat (pekerja perahu dan pengusaha lokal) diberikan keterampilan dalam mengelolanya biasanya mencakup pengkapasitasan sumber daya manusia dan organisasi; dan (3) dengan menggunakan metode pendayaan, dimana para pekerja perahu dan pengusaha pembuat kapal pinisi diberikan daya, kekuasaan dan memberikan peluang berdasarkan pada tingkat kemampuan atau kecakapan yang telah diperolehnya.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis selama dilapangan yang menemukan bahwa metode-metode yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terdiri atas 3 (tiga) metode sebagaimana yang telah

dijelaskan di atas. Hanya saja menurut penulis, selain dari ketiga metode di atas, yang tak kalah pentingnya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para pekerja perahu pinisi, kepada kelompok-kelompok usaha dan pengusaha lokal pembuat perahu pinisi agar hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan harmonis dan seimbang. Adapun pendekatan persuasif ini dapat dilakukan dengan cara membuka forum-forum diskusi sebagai wadah untuk saling tukar informasi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu HSM, selaku Lurah Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terkait dengan metode yang digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi adalah sebagai berikut:

“Biasanya metode yang digunakan adalah melalui metode penyuluhan dan metode pemberian pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai pembuat perahu pinisi. Akan tetapi sebelum metode tersebut diterapkan, perlu ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan seperti melakukan persiapan, pengkajian terhadap masalah, tahap perencanaan program alternatif dan beberapa tahapan yang dianggap penting untuk dijalankan”. (Hasil wawancara dengan Ibu HSM, pada tanggal 20 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa metode yang digunakan biasaya direalisasikan dalam bentuk penyuluhan dan pemberian pelatihan serta keterampilan kepada masyarakat pekerja perahu pinisi. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan sebelumnya hanya dalam bentuk penjelasan yang lebih rinci. Ditambahkan oleh informan bahwa sebelum melakukan metode tersebut, diperlukan adanya beberapa tahapan

seperti (1) melakukan tahap persiapan dimana dalam tahap ini mencakup persiapan petugas penyuluh dan lapangan yang akan digunakan untuk melakukan penyuluhan; (2) melakukan pengkajian, berupa proses pengidentifikasian masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk apa saja yang mereka butuhkan; dan (3) tahap perencanaan alternatif program apabila program yang dijalankan tidak berjalan dengan efektif atau sesuai dengan tujuan sehingga segera mungkin dilakukan alternatif program sebagai pengganti dari program sebelumnya.

Selain metode diatas penulis juga menemukan hasil dilapangan bahwa pemerintah Kabupaten Bulukumba terkhusus di Kelurahan Tanah Beru dalam mensejahterakan masyarakat pekerja perahu pinisi rutin melakukan kegiatan festival dengan inovasi memperkenalkan perahu pinisi serta keunikan-keunikan dalam proses pengerjaan perahu pinisi yang dimana di lakukan dengan cara mistis yang dapat memikat dan mencuri perhatian para wisatawan dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka sudah sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Prambudi (2003) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa pemberdayaan masyarakat kedalam adalah suatu daya dan upaya untuk mentransformasikan kesadaran masyarakat sekaligus bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan akses perbaikan kehidupannya dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pemberdayaan masyarakat pekerja perahu pinisi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja metode-metode tersebut akan lebih efektif apabila ditambahkan dengan pendekatan persuasif

kepada masyarakat pekerja perahu pinisi yang berada di Kelurahan Tanah Beru. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan persuasif ini lebih menekankan kepada hubungan emosional masyarakat dengan pemerintah agar tercipta keharmonisan dan keserasian dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan dengan maksud untuk menciptakan kemandirian usaha para masyarakat pekerja perahu pinisi.

5. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Sebagai katalisator dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba harus mampu berperan sebagai agen dalam percepatan pengembangan potensi daerah yang akan menjadi modal sosial untuk menarik partisipasi masyarakat. Dengan adanya peran pemerintah sebagai katalisator bukan suatu hal yang mustahil apabila kesenjangan pembangunan yang terjadi di berbagai wilayah yang terdapat di Kabupaten Bulukumba akan dapat diminimalisir dan diseimbangkan. Adanya kesenjangan sosial, wilayah tertinggal dan minimnya kualitas sumber daya manusia salah satunya dikarenakan karena pembangunan masing-masing daerah/wilayah tidak seimbang dan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sebagai katalisator dalam percepatan pengembangan berbagai potensi daerah harus sedapat mungkin dijalankan dengan efektif dan akuntabel sehingga akan mendorong kepercayaan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam program pemerintah.

a. Program percepatan pembangunan di Kelurahan Tanah Beru

Hal penting yang menjadi kunci dalam percepatan pembangunan di suatu wilayah termasuk di Kelurahan Tanah Beru adalah dengan melakukan pembangunan dan pembenahan aksesibilitas baik itu sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, perumahan, instalasi listrik dan lain-lain. Aksesibilitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan mereka, maka akan semakin cepat pula daerah atau wilayah tersebut berkembang dan maju.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak ZND, selaku Kasi. Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bontobahari terkait program percepatan pembangunan di Kelurahan Tanah Beru adalah sebagai berikut:

“Sampai sejauh ini pihak pemerintah termasuk Kecamatan dan Kelurahan senantiasa melakukan evaluasi terkait pengembangan potensi masing-masing wilayah. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari suatu pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai contoh adalah dengan membangun fasilitas kesehatan (puskesmas, dan pusku) yang ada di Kelurahan Tanah Beru, perbaikan infrastruktur jalan termasuk perbaikan sarana-sarana pendidikan. Kesemua program ini dimaksudkan untuk mempermudah akses bagi masyarakat dalam mengembangkan wilayahnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak ZND, pada tanggal 21 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sampai sejauh ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang dilakukan di seluruh wilayah termasuk yang berada di Kelurahan Tanah Beru. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana aksesibilitas yang dibangun membawa manfaat dan dampak yang positif terhadap perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat termasuk

peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Apabila dianggap bahwa pembangunan aksesibilitas tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, maka akan dilakukan proses pendampingan dengan maksud untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Namun apabila pembangunan aksesibilitas itu dianggap kurang tepat atau sesuai, maka pihak pemerintah yang bersangkutan akan melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan terhadap program yang dijalankan.

Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa program pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terkait pembangunan aksesibilitas di Kelurahan Tanah Beru sudah cukup tepat. Hal ini dikarenakan Kelurahan Tanah Beru merupakan salah satu daerah dengan letak geografis pantai pada ketinggian kurang lebih 500 m dari permukaan laut. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur jalan, dermaga, sarana kesehatan dan pendidikan merupakan program yang dinilai tepat dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya bagi para pekerja perahu pinisi dan pengusaha lokal pembuat perahu pinisi untuk mengimpor bahan utama yaitu kayu (kayu ulin/besi). Selain itu dengan adanya infrastruktur jalan menuju pusat kota (baik kecamatan maupun kabupaten) akan lebih memudahkan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan perahu pinisi seperti generator (mesin penggerak), bor listrik, paku, ketam, kuas, gergaji dan alat-alat lainnya.

Lebih lanjut wawancara dengan Ibu HSM, selaku Lurah Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terkait program percepatan pembangunan di Kelurahan Tanah Beru adalah sebagai berikut:

“Alhamdulillah, sampai sejauh ini masalah-masalah program pembangunan di Kelurahan Tanah Beru senantiasa mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Bulukumba. Apalagi baru-baru ini ada perbaikan sarana jalan dan pemasangan beberapa tiang listrik beton untuk penerangan masyarakat pada malam hari”. Jadi kalau menurut kami, pembangunan dan pembenahan akses jalan merupakan hal yang sentral bagi penduduk di wilayah ini”. (Hasil wawancara dengan Ibu HSM, pada tanggal 20 September 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa program percepatan pembangunan di wilayah Kelurahan Tanah Beru senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba utamanya yang menyangkut pembangunan akses jalan bagi masyarakat yang merupakan faktor utama dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Ditambahkan oleh informan bahwa salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan menambah tiang listrik beton sebagai alat penerangan masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan di atas mengenai program percepatan pembangunan di Kelurahan Tanah Beru, dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Muluk (2005) bahwa peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan seperti pada program percepatan pembangunan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berada di suatu wilayah termasuk di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan maksud agar program yang direalisasikan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan tepat sasaran. Selain itu perlu

ada evaluasi dalam setiap program percepatan pembangunan baik untuk program jangka pendek, menengah dan panjang sebagai bahan perbaikan setiap program yang dijalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba mengenai Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah sebagai Regulator dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja perahu pinisi terdiri dari 2 (dua) sub indikator yaitu program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan usaha, dimana program pemberdayaan masyarakat pemerintah melakukan bentuk pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pekerja perahu untuk menciptakan ekonomi kreatif dan usaha mandiri. Dan dalam kebijakan usaha sejauh ini baru sebatas program-program pengenalan perahu atau semacam program event atau festival dalam peningkatan kesejahteraan, sedangkan kebijakan usaha pembuatan perahu pinisi bagi masyarakat pekerja perahu pinisi belum direalisasikan dalam bentuk peraturan daerah
- b. Peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam hal ini terdiri dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Pemerintah dalam memberikan kegiatan penyuluhan bagi para masyarakat pekerja perahu lebih efektif lagi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, serta masyarakat lebih memerlukan solusi dan inovasi dalam peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, begitupun dalam hal pemberian pelatihan mampu memberikan

manfaat yang berarti, serta keterampilan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri

- c. Peran pemerintah sebagai Fasilitator dalam kegiatan pendampingan usaha masih belum intens dan efektif dilakukan oleh pemerintah setempat, padahal kegiatan ini sangat di butuhkan oleh para kelompok usaha dalam mencari solusi atau kendala yang mereka hadapi. Begitupun dalam pemberian modal usaha belum merata dilakukan kepada setiap pengusaha atau masyarakat pekerja perahu pinisi, seharusnya bantuan modal usaha kepada masyarakat harus mampu mendorong tingkat ekonomi mereka.
- d. Peran pemerintah sebagai Inovator, pada indikator ini terdiri dari metode peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi yang terdiri dari 3 (tiga) metode (1) melakukan penyadaran, (2) pengkapasitasan, (3) metode pendayaan. Dari metode pemberdayaan masyarakat pekerja perahu pinisi yang dijalankan oleh pemerintah setempat sudah sesuai dan berjalan dengan cukup baik.
- e. Peran pemerintah sebagai katalisator dalam hal ini yaitu program percepatan pembangunan di Kelurahan Tanah Beru pemerintah setempat sudah melakukan atau memperbaiki infrastuktur jalan sebagai akses menuju tempat tersebut dan memudahkan para pekerja perahu dan pengusaha lokal untuk mengimpor bahan utamanya yaitu kayu dan lebih memudahkan membeli peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan perahu pinisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan melihat permasalahan yang terjadi secara obyektif di lapangan, maka dari itu peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Keluarahan Tanah Beru

Diharapkan untuk senantiasa berperan aktif dalam program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat pembuat perahu pinisi baik sebagai agen pendamping bagi masyarakat maupun sebagai penterjemah setiap program-program pemerintah maupun sebagai mediator antara pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan masyarakat pekerja perahu pinisi dalam memberikan usulan dan masukan tentang apa yang dibutuhkan oleh mereka (para pekerja perahu pinisi) agar dapat berkembang dan mampu untuk mandiri, serta segera mampu merealisasikan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi dalam bentuk peraturan daerah.

2. Bagi Masyarakat Pekerja Perahu Pinisi

Senantiasa mendukung dan ikut menyukseskan program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba termasuk program-program pemberdayaan masyarakat baik dari segi pendidikan, kesehatan, aksesibilitas jalan dan pariwisata agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri dan dapat bersaing dengan wilayah-wilayah lain yang berada di Kabupaten Bulukumba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM: Yogyakarta.
- Caro, Pius. 2012. *Ekspedisi Pinisi Nusantara*. PT. Kompas Nusantara. Jakarta
- Dwijowijoto, Riant R, Wrihatnolo, Randy R. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*. Cetakan ke 2. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Gregorius.2011. "Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata-Provinsi NTT. "(*tesis*).Denpasar: Universitas Udayana
- Hidayat, Azis Alimul. 2014. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Edisi 2. Salemba medika: Jakarta.
- Hikmat, Harry 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Jaya, Nurul Ilmi. 2018. *Pola Hubungan Kerja dan Sistem Bagi Hasil Pada Pembuatan Kapal Pinisi di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Midgley, James (2005), *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Deperta Depag RI, Jakarta.
- Mappasomba. 2012. *Wisata Perahu Pinisi Sulawesi Selatan*. (online). (<https://wisatasulawesi.wordpress.com/wisata-sulawesi-selatan/pembuatan-perahu-pinisi/html>), diakses pada tanggal 10 desember 2016
- Musyarif, Ashar. 2017. *Perubahan Modal Sosial Pada Kelompok Pengrajin Perahu Pinisi di Kabupaten Bulukumba*. Makassar
- Natalia, Intan Indra. 2016. *Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmasinu Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.



- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja*. PT. Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta.
- Nugroho, Agustino Adi. 2008. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*. FIA, UB: Malang.
- Pambudi, Himawan S. 2003. *Politik Pemberdayaan; Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Laper Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2016.
- Rosni. 2017. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*. Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Vol. 9, No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiarto, Meilan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Ardana: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan publik*. Alfabeta: Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Alex Media Komputindo: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2012. *Prilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Implikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan, jilid I. Erlangga: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Viva.co.id, *Kapal Pinisi antara Bangkit dan dil Lupakan*. Jumat, 30 September 2016

Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

LAMPIRAN PENELITIAN:

1. Izin Penelitian
2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Lampiran 1. Surat Penelitian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221 Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588
Nomor	: 1407/FSP/A.1-VIII/IX/1439 H/2018 M
Lamp.	: 1 (satu) Eksamplar
Hal	: Pengantar Penelitian Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan `Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di - Makassar
Assalamu Alaikum Wr. Wb.	
Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :	
Nama Mahasiswa	: Andi Meuthia AM
Stambuk	: 105610517114
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian	: Di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
Judul Skripsi	: <i>“Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”.</i>
Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.	
Jazakumullahu Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.	
Makassar, 06 September 2018 D e k a n, Ub. Pembantu Dekan I	
 Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM. 1084 366	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3@umuhm.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2263/Izn-5/C.4-VIII/IX/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan

di -

Bulukumba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1407/FSP/A.1-VIII/IX/1439 H/2018 M tanggal 6 September 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI MEUTHIA AM**

No. Stambuk : **10561 0517114**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 September 2018 s/d 8 Nopember 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Dr. Sutomo No.4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 17 September 2018

Nomor : 070/ ~~B.55~~/Kesbangpol/IX/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

K e p d a
Yth. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab.Bulukumba
di-
Jl.Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :2263/Izn-5/C.4-VIII/IX/37/2018 tanggal 6 September 2018. Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : ANDI MEUTHIA AM
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba 12 - 07 - 1997
No.Pokok : 10561 0517114
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswi SI Unismuh Makassar
Alamat : Jl. Dg Tata Lama No, 10 Makassar
Hp. 085 397 709 801

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Camat Bontobahari, Kantor Lurah Tanah Beru Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul:

" PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PERAHU PINISI DI KELURAHAN TANAH BERU KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA"

S e l a m a : Tmt. 17 September s/d 31 Oktober 2018
Pengkut/Ang. Team : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Izin Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperlunya.

KEPALA KANTOR

ANDI LA BUL LAH. S.STP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19770421 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab.Bulukumba
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar
4. Peninggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)**

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 17 September 2018

Nomor : 695/DPMPSTP/IX/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Bappeda Bulukumba
2. Kepala Dinas PMD Bulukumba
3. Camat Bonto Bahari
4. Lurah Tanah Beru
Masing – Masing
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/855/Kesbangpol/IX/2018 tanggal 17 September 2018 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini

Nama : **ANDI MEUTHIA. AM**
Nomor Pokok : **10561 0517114**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Alamat : **JL. DG. TATA LAMA NO. 10 MAKASSAR**

Bermaksud Melakukan Penelitian di Bappeda, Dinas PMD, Camat Bonto Bahari dan Lurah Tanah Beru Kabupaten Bulukumba Dalam Rangka Penyusunan **SKRIPSI** dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA PERAHU PINISI DI KELURAHAN TANAH BERU KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA"** yang akan berlangsung pada tanggal 17 September s/d 31 Oktober 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/ pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. B. Krg. SUGINNA
Bangkat : Pembina Utama Muda
: 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak DRD, selaku Camat Bontobahari (24/9/2018)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak AMK, selaku pekerja perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru (26/9/2018)



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak RFI, selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Bulukumba (24/9/2010)



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu HSM, selaku Lurah Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba (20/9/2018)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak KR D, selaku pengusaha lokal pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru (25/9/2018)



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak SYM, selaku pengusaha lokal pembuat perahu pinisi di Kelurahan Tanah Beru (28/9/2018)



Gambar 7. Wawancara dengan Ibu ARS, selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba (20/9/2018)



Gambar 8. Proses Pembuatan Perahu Pinisi Secara Tradisional Oleh Masyarakat Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru



RIWAYAT HIDUP

ANDI MEUTHIA A.M., lahir pada tanggal 12 Juli 1997 di Bulukumba Sulawesi Selatan. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan Andi Mattalatta, S.E dan Andi Rayhani Apdy,S.Pd. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 155 Center mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bontobahari dan tamat tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Bontobahari dan tamat tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Dalam organisasi intra kampus penulis juga merupakan salah satu pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) sebagai Sekertaris Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik (KIAP) tahun 2015-2016 dan melanjutkan kepengurusan di tahun 2016-2017 sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Anggota (POA). Pada tahun 2019 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba” dan mendapatkan gelar S.Sos.